

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ORANG-ORANG JEPANG DI HINDIA BELANDA

2.1 Sejarah Kedatangan Orang-Orang Jepang ke Hindia Belanda

Kedatangan pertama kali orang Jepang ke wilayah Kepulauan Nusantara dibawa oleh kapal segel merah atau *Shuinsen* (朱印船) yang membawa misi perdagangan pada masa Keshogunan Tokugawa sekitar abad ke-17 yang berlayar ke wilayah selatan Jepang hingga ke Asia Tenggara. Misi perdagangan antara Jepang dan Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari peran orang Belanda yang pada masa itu telah menduduki pulau Jawa dan mendirikan pusat perdagangan di kota Batavia, dan orang-orang Belanda yang telah mendapatkan izin dagang dengan Jepang melalui Dejima di Nagasaki. Selain itu, pada tahun 1618 tercatat bahwa gubernur VOC di Jawa pada masa itu Jean Pieterzoen Coen meminta untuk dikirimkan 25 orang Samurai Jepang. Kemudian pada tahun 1620, menurut catatan Belanda bahwa terdapat 90 orang Samurai Jepang yang direkrut dari pulau-pulau sekitar Jawa untuk memperkuat pertahanan kastil Batavia. (Wikipedia: Red seal ship)

2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Orang-Orang Jepang ke Hindia Belanda Pada Awal Abad 20

Kedatangan orang-orang Jepang ke Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mendapat pengaruh dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

2.1.1.1 Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Perkembangan Ekonomi dan industri

Perubahan situasi Jepang pada masa restorasi Meiji memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Jepang. Politik menutup diri atau *sakoku* yang diberlakukan oleh pemerintah Tokugawa pada akhirnya berakhir dan membuat Jepang menjadi Negara yang terbuka bagi masyarakat internasional.

Percepatan pembangunan di segala aspek pada masa tersebut terjadi secara cepat. Berbagai macam hal seperti budaya dan teknologi diserap pemerintah Jepang untuk memajukan dan menjadikan Jepang setara dengan Negara-negara maju di Eropa Barat. Kemajuan di bidang perekonomian dan industri sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat pada masa tersebut. Industri-industri Jepang yang menjadi modern menghasilkan hasil produksi yang banyak dan membutuhkan daerah pemasaran yang luas.

Perdagangan internasional yang dijalankan oleh Jepang dengan negara-negara barat menjadi salah satu pendukung penyebaran produk-produk Jepang ke seluruh dunia. Belanda sebagai salah satu negara Eropa yang telah menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan Jepang selama beratus-ratus tahun menjadi salah satu partner yang penting. Koloni Belanda di Asia Tenggara menjadi salah satu target pemasaran produk-produk Jepang pada masa itu. Sejalan dengan penyebaran produk Jepang khususnya ke wilayah Hindia Belanda membuat orang-orang Jepang juga hijrah ke wilayah tersebut untuk mencari peluang bisnis baru.

2.1.1.2 Diaspora Jepang

Diaspora Jepang adalah fenomena imigrasi orang-orang Jepang ke luar negeri. Orang-orang yang melakukan emigrasi dan keturunan mereka di luar negeri dikenal dengan istilah *Nikkei* (日系). Fenomena emigrasi secara besar-besaran terjadi pada zaman meiji. Fenomena ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk Jepang yang meningkat. Hal ini menyebabkan keterbutuhan wilayah tinggal bagi orang-orang tersebut sekaligus kebutuhan untuk mencari mata pencaharian yang baru untuk mempertahankan hidup karena faktor permintaan tersebut sudah tidak lagi terakomodasi di wilayah tinggal asal. Pada masa itu, Fenomena ini juga didukung dengan "*south sea fever* atau 南洋熱, yaitu pemikiran tentang negara-negara di wilayah selatan Jepang yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Fenomena ini berkembang sejalan dengan tujuan imperialism Jepang ke negara-negara tetangganya di wilayah Asia timur, seperti daratan cina, semenanjung korea, dan kemudian meluas ke daerah selatan kepulauan Jepang seperti Taiwan, kepulauan Filipina, daerah Indo-cina, semenanjung Malaya, dan kepulauan Hindia timur.

Konsep imperialisme dan ideologi ekspansionisme ke daerah selatan tersebut sebagai akibat dari sikap ultranasionalisme Jepang yang tumbuh dikalangan militer pada masa itu. Kemenangan Jepang atas dua perang yang terjadi, yaitu perang antara Jepang dan Cina, dan perang antara Jepang dan Rusia, membuat Jepang menjadi salah satu kekuatan penting di Asia. Ideologi tentang negara Jepang yang hebat dan berwibawa, dan konsep-konsep tentang wilayah Asia Tenggara diajarkan kepada anak-anak di sekolah dan tercantum jelas pada buku-buku ajar mereka pada saat itu. Hal ini lah yang dikemudian hari dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu ekspansi militer Jepang ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Hindia Belanda pada tahun 1941-1945 atau yang secara umum lebih dikenal dengan sebutan "Perang Asia Timur Raya".

2.1.1.3 Liberalisasi Hindia Belanda Pada Tahun 1870

Pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak tahun 1870 mengeluarkan undang-undang agraria (*Agrarische wet*) dan undang-undang gula dan mengakhiri sistem politik tanam paksa yang telah berlangsung sejak tahun 1830 dan sangat merugikan bagi para petani pada masa itu. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut didasari oleh konsep perdagangan bebas yang diharapkan dapat lebih memajukan roda perekonomian pada masa itu.

Salah satu hasil penerapan undang-undang tersebut adalah terbuka luasnya kesempatan bagi para investor asing untuk membuka usaha di Hindia Belanda. Kesempatan ini juga dilihat oleh orang-orang Jepang yang beremigrasi ke wilayah Hindia Belanda pada masa itu. Berdasarkan undang-undang tersebut para investor asing dimungkinkan untuk menyewa tanah-tanah milik orang pribumi. Sejak diberlakukannya liberalisasi Hindia Belanda banyak perusahaan, perkebunan milik asing dan berbagai macam jenis usaha lainnya.

2.1.1.4 Hubungan Bilateral yang Baik Antara Jepang dan Belanda

Hubungan kerjasama antara Jepang dan Belanda sudah terjalin sejak dibukanya perdagangan bilateral Jepang dan Belanda melalui Hirado dan Dejima pada masa Tokugawa. Sejak saat itu Belanda secara tidak langsung menjadi jembatan yang menghubungkan Jepang dengan dunia barat di berbagai bidang seperti budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jepang yang dekat dengan Belanda melihat Hindia Belanda sebagai salah satu wilayah koloni Belanda yang bersifat netral dan stabil menjadi salah satu daya tarik untuk dijadikan tempat tinggal dan mengembangkan potensi produk-produk industri Jepang yang pada masa itu sangat berkembang pesat.

2.2 Status Orang-Orang Jepang di Hindia Belanda

Salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda semasa penjajahan di Indonesia yang mencolok adalah pembagian stratifikasi masyarakat yang tinggal di wilayah Hindia Belanda sesuai dengan golongan rasa tau suku bangsa. Peraturan ini secara garis besar membagi tiga kelas masyarakat yang diimplementasikan sejalan dengan peraturan-peraturan pemerintah kolonial, khususnya yang mengatur tentang tata kehidupan masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi tiga kelas, yaitu orang-orang Belanda dan orang-orang kulit putih lainnya merupakan kelas paling atas. Kelas kedua adalah orang-orang timur asing yang meliputi orang-orang Asia seperti Cina, India, Arab, Jepang dan sebagainya. Dan kelas yang terakhir adalah golongan orang-orang pribumi asli Indonesia.

Setiap kelas masyarakat terikat dengan peraturan masing-masing yang tertuang di dalam undang-undang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Orang Jepang sebagai golongan kelas dua pada awalnya memiliki derajat yang sama dengan orang Cina. Di dalam tatanan hukum dan perizinan mereka mengalami pembatasan-pembatasan yang sama dengan orang Cina. Namun keadaan tersebut berubah setelah peristiwa kemenangan Jepang pada perang dengan Cina yang berakhir tahun 1895. Kemudian pada tahun 1899, orang Jepang di Hindia-Belanda memperoleh pengakuan kesetaraan hak dan status dengan orang-orang Eropa.

Dalam hal ini, pemerintah Kolonial Hinda-Belanda secara tegas dan jelas menjelaskan tentang status orang-orang Jepang yang tinggal di wilayah Hindia-Belanda ke dalam peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda yang bernama *Indiesche Staatsregeling* yang tercantum pada pasal 163 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

Pasal 163

1. Bila ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, peraturan umum dan *verordening* lainnya, *reglemen*, pemeriksaan polisi dan peraturan administrasi berbeda-beda yang digunakan untuk golongan Eropa, orang

Indonesia dan golongan Timur Asing, berlakulah pelaksanaan-pelaksanaan seperti berikut.

2. Ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa berlaku bagi:
 1. semua orang Belanda;
 2. semua orang yang tidak termasuk dalam no. 1 yang berasal dari Eropa;
 3. semua orang Jepang dan selanjutnya semua pendatang dari luar negeri yang tidak termasuk dalam no. 1 dan 2 yang di negeri-asalnya berlaku bagi mereka hukum keluarga yang pada dasarnya mempunyai asas-asas hukum yang sama dengan hukum keluarga Belanda;
 4. anak-anak yang sah atau yang diakui sah berdasarkan undang-undang di Indonesia beserta keturunan-keturunan dari orang-orang seperti yang disebutkan dalam no. 2 dan 3.

Sumber: <http://hukum.unsrat/uu/is.htm>

Pada pasal 163 ayat pertama membagi jelas ketiga golongan kelas masyarakat di Hindia Belanda. Kemudian pada pasal kedua dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan untuk golongan orang eropa yang di dalamnya tertulis jelas bahwa orang Jepang termasuk kedalam kelas orang Eropa dan terikat hukum Eropa pada masa itu. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pada masa itu orang-orang Jepang memiliki fasilitas yang sama dengan orang Eropa baik secara hukum maupun sosial masyarakat. Secara hukum, mereka memiliki akses yang mudah dalam pengurusan perizinan untuk membuka usaha, berdagang, tinggal, dan sebagainya. Dalam tatanan masyarakat pada masa itu mereka juga dianggap sebagai "Tuan" dan "Nyonya" selayaknya orang-orang Belanda. Ketika bertamu ke rumah orang Belanda mereka juga dipersilakan untuk langsung masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu mereka tidak seperti orang Cina yang disambut hanya sampai beranda rumah dan tidak seperti orang Pribumi yang hanya dipersilakan duduk di lantai. Dengan kata lain orang-orang Jepang pada masa itu memiliki kehidupan yang sangat nyaman.

tersebut merupakan kota-kota pelabuhan penting di Jawa yang menjadi pusat perdagangan dan konsentrasi kegiatan ekonomi pada saat itu.

Penggolongan populasi orang Jepang di Hindia Belanda yang dilakukan oleh pihak konsulat secara umum dibagi menjadi enam golongan, yaitu, pengimpor langsung, penjual obat-obatan dan barang-barang kebutuhan pokok atau umum, pedagang keliling, perikanan, pengusaha rumah makan, dan prostitusi. Persentase jumlah populasi pria pada tahun 1909 terbanyak adalah bidang perikanan. Selanjutnya posisi kedua diduduki oleh pekerja toko dan pedagang keliling (Shiraishi,1998:145)

Pertumbuhan populasi orang-orang Jepang di Hindia-Belanda secara cepat terjadi pada rentang tahun 1909 sampai tahun 1916, atau sebelum Perang Dunia ke-1. Pasar Hindia-Belanda yang luas dianggap sebagai tempat yang bagus dan menguntungkan bagi aktivitas bisnis Jepang. Penyebaran populasi orang Jepang meliputi segala macam bidang, seperti perdagangan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Namun menurut perkembangannya populasi ini paling banyak menggeluti bidang perdagangan. Rata-rata pertumbuhan populasi orang Jepang di Hindia-Belanda sejak tahun 1912 sampai tahun 1916 mencapai angka 500 orang pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ini mengalahkan pertumbuhan populasi orang Jepang di Singapura yang rata-rata pertahunnya mencapai 350 orang, dan Filipina yang memiliki rata-rata 120 orang pertahun (Shiraishi,1998:141)

Kecenderungan awal gelombang migrasi orang Jepang ke wilayah Hindia-Belanda didominasi orang kaum wanita. Mereka datang ke wilayah ini bekerja sebagai pelayan, pegawai toko, namun mayoritas dari mereka berprofesi sebagai pelacur. Populasi wanita Jepang di Hindia Belanda secara bertahap menurun pada tahun-tahun berikutnya yang disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan pelarangan praktik prostitusi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pelarangan prostitusi di Hindia Belanda dapat dikatakan yang pertama kali jika dibandingkan dengan

wilayah-wilayah koloni lain di Asia Tenggara. Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.W.F. Idenburg yang menjabat mulai tahun 1909 mengeluarkan peraturan untuk menghapuskan segala praktik prostitusi pada tahun 1912, kemudian hukum pidana dirubah pada tahun berikutnya untuk menjerat para pelaku, pengguna jasa prostitusi, dan kepada siapapun yang menggantungkan hidupnya pada prostitusi. Namun penerapan peraturan ini secara efektif hanya berlaku di Pulau Jawa karena pada saat itu wilayah koloni Hindia Belanda belum mencakup seluruh Kepulauan Nusantara.

Akibat dari pemberlakuan peraturan ini banyak wanita Jepang yang akhirnya pindah ke wilayah Sumatra dan pulau-pulau lain di Nusantara untuk menghindari pelarangan tersebut. Akibatnya jumlah populasi wanita Jepang di Jawa menurun drastis. Pergeseran populasi ini tampak jelas apabila melihat data tahun 1917 bahwa warga Jepang perempuan yang terdaftar sebagai pembantu rumah tangga, pekerja toko, pelayan, penghibur, dan pelacur jumlahnya mencapai 584 orang. Namun, 355 orang tinggal di Pulau Sumatra dan sisanya 49 orang tinggal di Pulau Jawa.

Penurunan populasi wanita Jepang dan meningkatnya populasi pria Jepang di Hindia Belanda dapat terlihat pada tahun 1913 sampai 1914. Pada tahun 1913 populasi wanita melebihi jumlah pria, namun sebaliknya pada tahun 1914 jumlah pria meningkat mengalahkan populasi wanita secara keseluruhan. Dengan demikian wanita pekerja yang datang maupun dikirim ke Hindia Belanda telah menjadi penentu kecenderungan populasi orang Jepang di Hindia Belanda sampai pada tahun 1913, kemudian posisinya digantikan oleh populasi pria sejak tahun 1914. Pertambahan populasi pria Jepang di Hindia Belanda secara bertahap naik dan mendominasi sampai tahun 1930an. Secara garis besar populasi ini didominasi oleh para pria yang berprofesi sebagai pedagang dan pekerja toko. Hal ini sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan bisnis perusahaan-perusahaan Jepang yang muncul dan tumbuh di Hindia Belanda pada masa itu.

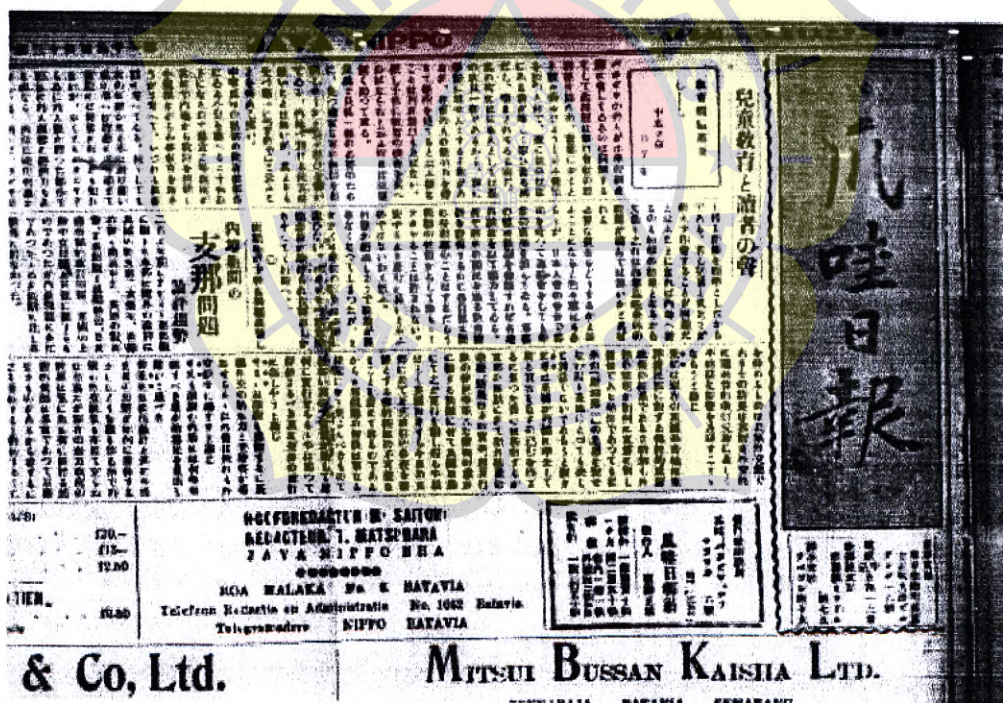
Melihat pertumbuhan populasi orang Jepang di Hindia Belanda yang bagus dan meningkat dari tahun ke tahun, maka pada tahun 1919 dibuka konsulat baru di kota Surabaya, dan konsulat di Batavia kemudian dinaikkan statusnya menjadi Konsulat Jenderal. Tugas mengenai survey populasi orang Jepang sejak saat itu dibagi menjadi 2 antara Konsulat Jenderal Batavia dan Konsulat Surabaya. Seiring dengan pertumbuhan populasi orang Jepang di Hindia Belanda, banyak perkumpulan-perkumpulan orang-orang Jepang terbentuk. Para perkumpulan ini menjadi wadah bagi orang-orang Jepang pada masa itu untuk saling berinteraksi sekaligus memperluas jaringan bisnis mereka. Disisi lain, perkumpulan-perkumpulan tersebut tersebar di daerah-daerah. Mereka juga mengumpulkan data-data populasi yang kemudian juga digunakan oleh pihak konsulat sebagai data pendukung sebagai bahan laporan ke Kementerian Luar Negeri Jepang.

Pertumbuhan suatu komunitas di wilayah asing secara bertahap menghasilkan bukti-bukti eksistensi mereka di lingkungan masyarakat. Hal ini juga terlihat pada komunitas orang-orang Jepang yang tinggal di wilayah Hindia Belanda. Contohnya seperti komunitas etnis Tionghoa yang juga banyak bergerak di bidang perdagangan pada masa itu kemudian banyak mendirikan sekolah-sekolah Cina untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang dapat mempelajari dan melindungi nilai-nilai sosial budaya mereka seperti di negeri asal. Komunitas Jepang di Hindia Belanda juga sejalan dengan perubahan tersebut. Setelah mereka banyak mendirikan perkumpulan-perkumpulan, kemudian mereka mendirikan sekolah-sekolah Jepang di kota-kota besar. Kota Surabaya pada masa itu merupakan pusat perdagangan ekspor-impor sekaligus kota pelabuhan terbesar di Hindia Belanda menjadi tempat tinggal bagi komunitas orang Jepang yang paling banyak. Pada tahun 1925 atas inisiatif salah satu perkumpulan Jepang di Surabaya mendirikan sekolah Jepang pertama di kota itu. Kemudian seiring dengan pertumbuhan populasi di daerah-daerah, maka secara bertahap sekolah-sekolah yang sama pun didirikan di kota-kota besar lainnya. Pada tahun 1928 sekolah Jepang pertama di Batavia didirikan, kemudian pada tahun 1929

sekolah Jepang berdiri di Semarang, dan pada tahun 1933 berdiri sekolah Jepang di Bandung.

Selain mendirikan sekolah-sekolah, komunitas Jepang di Hindia Belanda juga menerbitkan surat kabar berbahasa Jepang di Batavia pada tahun 1920 yang bernama *Java Nippo*, kemudian digantikan oleh *Toindo Nippo* sejak tahun 1930an. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan populasi orang Jepang di Hindia Belanda sudah sangat luas pada masa itu. Hal tersebut menghasilkan keterbutuhan tentang informasi tentang peristiwa yang terjadi baik di negara asal Jepang, maupun peristiwa dan situasi yang terjadi di dalam negeri Hindia Belanda sendiri. Selain menjadi wahana mendapatkan informasi, surat kabar Jepang pada masa itu juga menjadi ajang promosi bisnis orang-orang Jepang dengan memasang iklan surat kabar.

Gambar 3.1, Surat Kabar “Java Nippo”



Sumber: *Java Nippo*, Maret 1927 no.1943, arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kecenderungan populasi orang Jepang di Hindia Belanda akhirnya mulai menurun sedikit pada tahun 1924. Hal ini juga secara tidak langsung mencerminkan penurunan populasi orang Jepang di bidang perdagangan. Peristiwa ini timbul sebagai akibat dari resesi ekonomi yang terjadi pasca Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1927 populasi orang Jepang di Hindia Belanda menanjak kembali dengan cepat. Dalam kurun waktu 4 tahun mulai tahun 1927 sampai tahun 1931 terjadi pertumbuhan populasi yang melebihi rata-rata pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu rata-rata mencapai lebih dari 500 orang per tahun. Kemudian pertumbuhan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1933 dan setelah itu secara berangsur-angsur menurun. Penurunan jumlah populasi khususnya populasi di bidang perdagangan pada saat itu adalah akibat dari dikeluarkannya peraturan darurat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda mengenai pembatasan barang impor dan pembatasan masuknya orang asing ke wilayah Hindia Belanda. Hal ini terjadi sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah kolonial pada masa itu untuk menahan efek negatif dari krisis ekonomi dunia yang terjadi sejak tahun 1929 sebagai akibat dari jatuhnya nilai bursa saham Wall Street di Amerika. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menanggulangi penyebaran produk-produk murah dari luar negeri khususnya barang-barang dari Jepang yang murah supaya menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri Hindia Belanda pada masa itu.